

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 37 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa indikator kinerja utama Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama perlu disesuaikan dengan perubahan indikator kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;

10. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015  
tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah  
Kota Malang Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Malang.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Malang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
9. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama ini adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

### Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018.

### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- (4) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah serta disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 5

Dalam hal Indikator Kinerja Utama ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan, Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur, agar dilakukan penyesuaian lebih lanjut untuk perbaikan.

##### Pasal 6

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini, Inspektorat diberikan tugas untuk :

- a. melakukan *review* atas capaian kinerja setiap Perangkat Daerah dan unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dan melaporkan kepada Walikota.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 22 - 6 - 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 22 - 6 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH. MHum

PEMBINA

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR : 37 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.

**I. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MALANG**

<b>VISI : Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartabat</b>				
<b>MISI 1 : Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan</b>				
<b>KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/MI <b>dibagi</b> dengan jumlah penduduk berusia 7-12 th X100%  <b>Penjelasan :</b> siswa SD/MI yang dimaksud adalah seluruh siswa SD/MI tanpa membedakan usia (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008)	- Dinas Pendidikan - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Data Individu Sekolah, Dapodik - Data penduduk usia 7-12 th

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	<p>Jumlah penduduk usia antara 7-12 th yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/MI dibagi jumlah penduduk usia 7-12 th</p> <p><b>Penjelasan :</b> Penduduk Kota Malang yang berusia 7-12 tahun yang sekolah di SD/MI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Individu Sekolah, Dapodik</li> <li>- Data penduduk usia 7-12 th</li> </ul>
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	<p>Jumlah siswa pada tingkat pendidikan SMP/MTs <b>dibagi</b> dengan jumlah penduduk berusia 13-15 th X100%</p> <p><b>Penjelasan :</b> siswa SMP/MTs yang dimaksud adalah seluruh siswa SMP/MTs tanpa membedakan usia (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Individu Sekolah, Dapodik</li> <li>- Data penduduk usia 13-15 th</li> </ul>



KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	<p>Jumlah penduduk usia antara 13-15 th yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SMP/MTs dibagi jumlah penduduk usia 13-15 th</p> <p><b>Penjelasan :</b> Penduduk Kota Malang yang berusia 13-15 tahun yang sekolah di SMP/MTs</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Individu Sekolah,Dapodik</li> <li>- Data penduduk usia 13-15 th</li> </ul>
	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	<p>Jumlah siswa pada tingkat pendidikan SMA/SMK/MA <b>dibagi</b> dengan jumlah penduduk berusia 16-18 th X100%</p> <p><b>Penjelasan :</b> siswaSMA/SMK/MA yang dimaksud adalah seluruh siswaSMA/SMK/MA tanpa membedakan usia (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Individu Sekolah,Dapodik</li> <li>- Data penduduk usia 16-18 th</li> </ul>

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	<p>Jumlah penduduk usia antara 16-18 th yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SMA/SMK/MA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 th</p> <p><b>Penjelasan :</b> Penduduk Kota Malang yang berusia 16-18 tahun yang sekolah di SMA/SMK/MA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Individu Sekolah, Dapodik</li> <li>- Data penduduk usia 16-18 th</li> </ul>
	7. Angka Melek Huruf	<p>Jumlah penduduk usia 15 th ke atas dapat baca tulis <b>dibagi</b> jumlah penduduk usia 15 th ke atas X 100%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar/Data penduduk usia 15 th ke atas dapat baca tulis</li> <li>- Data Badan Pusat Statistik</li> <li>- Data kependudukan</li> </ul>
	8. Angka Kelulusan	<p>Jumlah kelulusan pada jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK) <b>dibagi</b> jumlah siswa tingkat tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun ajaran berkenaan X 100%</p>	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data kelulusan setiap jenjang pendidikan</li> <li>- Data siswa tingkat tertinggi pada setiap jenjang pendidikan</li> </ul>

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	<p>9. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs</p>	<p>Jumlah anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah sampai dengan SMP/MTs dibagi jumlah seluruh anak usia sekolah sampai dengan SMP/MTs dari keluarga pra sejahtera X 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kriteria pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai keluarga sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan</li> </ul>	<p>Dinas Pendidikan</p>	<p>- Data jumlah siswa SD/MI sampai dengan SMP/MTs yang berasal dari keluarga prasejahtera</p>

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun <b>dibagi</b> jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama X 1.000	Dinas Kesehatan	- Profil Kesehatan Kota Malang - Hasil monev pelayanan kesehatan
	2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	Banyaknya kematian ibu saat hamil, melahirkan dan nifa <b>dibagi</b> jumlah Ibu saat hamil, melahirkan dan nifas X 100.000 KH	Dinas Kesehatan	- Profil Kesehatan Kota Malang - Hasil monev pelayanan kesehatan
	3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	Jumlah tenaga medis X 1.000 <b>dibagi</b> jumlah penduduk Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis.	Dinas Kesehatan	- Profil Kesehatan Kota Malang - Data kependudukan
	4. Rasio Posyandu per Satuan Balita	Jumlah posyandu X 1.000 <b>dibagi</b> jumlah balita	Dinas Kesehatan	Hasil monev kegiatan posyandu

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	5. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	<p>Jumlah Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis dibagi jumlah penduduk yang masuk kategori miskin X 100%</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Penduduk miskin adalah penduduk yang memenuhi minimal 9 variabel dari 14 variabel miskin menurut standar kriteria BPS</p>	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Badan Pusat Statistik</li> <li>- Profil Kesehatan Kota Malang</li> <li>- Hasil monev pelayanan kesehatan</li> </ul>
	6. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan Kota Malang

**MISI 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	1. Persentase koperasi sehat	<p>Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah seluruh koperasi X 100%</p> <p><b>Penjelasan :</b> Koperasi sehat adalah koperasi yang mampu memenuhi aspek kesehatan koperasi sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 20/PER/M.KUKM/IX/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No: 14/PER/M.KUKM/XII/2009 yang meliputi : aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan serta aspek jatidiri koperasi.</p>	Dinas Koperasi dan UKM	Hasil kegiatan moneyv dan pembinaan Koperasi

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	2. Kontribusi UKM terhadap Total PDRB	PDRB UKM <b>dibagi</b> total PDRB X 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Koperasi dan UKM</li> <li>- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil Kota Malang/Kota Malang dalam Angka</li> <li>- Data Badan Pusat Statistik</li> </ul>
Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	1. Persentase sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap total PDRB	PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran <b>dibagi</b> total PDRB X 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil Kota Malang/Kota Malang dalam Angka</li> <li>- Data Badan Pusat Statistik</li> </ul>
	2. Persentase sektor industri pengolahan terhadap total PDRB	PDRB sektor industri pengolahan <b>dibagi</b> total PDRB X 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>- Dinas Perindustria dan Perdagangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil Kota Malang/Kota Malang dalam Angka</li> <li>- Data Badan Pusat Statistik</li> </ul>
Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah angkatan kerja yang menganggur (tidak bekerja) dibagi jumlah Angkatan Kerja keseluruhan (usia 15 – 59 tahun) x 100%	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil monev ketenagakerjaan</li> <li>- Profil Kota Malang</li> </ul>

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	2. Tingkat partisipasi angkatan kerja	<p>Jumlah Angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas X 100%</p> <p><b>Penjelasan :</b> Angkatan kerja 15 tahun ke atas adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja</p>	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	<p>- Hasil monev ketenagakerjaan</p> <p>- Profil Kota Malang</p>
Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	<p>Jumlah nilai penanaman modal dan investasi tahun n dikurangi Jumlah nilai penanaman modal dan investasi tahun n-1 dibagi Jumlah nilai penanaman modal dan investasi tahun n-1</p> <p><b>Penjelasan :</b> Nilai penanaman modal dan investasi daerah (milyar rupiah) pada tahun berkenaan</p>	Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal	Hasil koordinasi dengan BKPM
Meningkatnya ketersediaan pangan ( <i>food availability</i> )	Ketersediaan pangan ( <i>food availability</i> )	<p>Rata-rata jumlah ketersediaan pangan per tahun (kg) <b>dibagi</b> jumlah penduduk X 100%</p> <p><b>Penjelasan :</b> Kriteria pangan meliputi : padi, tebu, ikan, daging dan telur</p>	<p>- Dinas Pertanian</p> <p>- Kantor Ketahanan Pangan</p>	Laporan Hasil Kegiatan monev produk pangan Daerah



**MISI 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Menurunnya persentase penduduk miskin	Angka kemiskinan Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	<p>Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin <b>dibagi</b> jumlah penduduk X 100%</p> <p>Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin tahun n-1 dikurangi Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin tahun n dibagi Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin tahun n-1 x 100%</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Penduduk miskin adalah penduduk yang memenuhi minimal 9 variabel dari 14 variabel miskin menurut standar kriteria BPS</p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Hasil Monev Kemiskinan</li> <li>- Data Badan Pusat Statistik</li> </ul>

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental sert lanjut usia tidak potensial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	<p>Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yangmendapatkan penanganan<b>dibagi</b> jumlah seluruh penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensialX 100%</p> <p><b>Penjelasan :</b> Yang dimaksud mendapatkan penanganan adalahyang telah diberikan bantuan/pelatihan</p>	Dinas Sosial	Laporan Hasil Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial
Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	<p>Jumlah korban bencana yang tertangani <b>dibagi</b> jumlah seluruh korban bencanaX 100%</p> <p><b>Penjelasan :</b> kriteria tertangani adalah pada korban bencana diberikan bantuan dalam bentuk bantuan relokasi sementara, bantuan kebutuhan pokok, bantuan kesehatan, bantuan bimbingan konseling, rohani dan moral.</p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>Angka harapan hidup perempuan ditambah angka melek huruf perempuan dan pendapatan perempuan dibagi 3 (tiga)</p> <p>Penjelasan : Hampir sama dengan IPM namun pada penghitungan Indeks Pembangunan Gender, komponen rata-rata pencapaian usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki.</p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil Kota Malang/Kota Malang dalam Angka</li> <li>- Data Badan Pusat Statistik</li> </ul>
	2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<p>Indeks keterwakilan perempuan diparlemen ditambah indeks pengambilan keputusan ditambah pendapatan perkapita perempuan dibagi 3 (tiga)</p> <p>Penjelasan : Merupakan indeks komposit dari Tiga komponen penyusun yaitu : keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan</p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti.	Jumlah kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama x 100%  Penjelasan : Ditindaklanjuti adalah dilaksanakan sesuai dengan bunyi kesepakatan	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Forum Komunikasi Antar Umat Beragama	- Hasil musyawarah Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang
	2. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	Jumlah kerusuhan bermotif SARA tahun n-1 dikurangi jumlah kerusuhan tahun n dibagi jumlah kerusuhan bermotif SARA tahun n-1 x100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data Kerusuhan SARA pada Kepolisian
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	1. Persentase penurunan angka kriminalitas	Jumlah kriminalitas tahun n-1 dikurangi jumlah kriminalitas tahun n dibagi jumlah kriminalitas tahun n-1 x 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data tindak kriminalitas pada Kepolisian
	2. Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda	Jumlah kasus pelanggaran Perda tahun n-1 dikurangi jumlah kasus pelanggaran Perda tahun n dibagi jumlah kasus pelanggaran Perda tahun n-1 x 100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Data Pelanggaran Perda

**MISI 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan**

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	1. Luasan kawasan kumuh	Jumlah seluruh luasan kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan</li> </ul>	Hasil monev pencapaian SPM bidang Perumahan
	2. Persentase jalan kota dalam kondisi baik	<p>Jumlah kumulatifpanjang jalan memenuhi kondisi jalan baik dan sedang <b>dibagi</b> jumlah kumulatifpanjang jalan X 100%</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan <math>\leq 6\%</math>), sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan</p>	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan	Laporan hasil kegiatan pengawasan dan pemeliharaan jalan

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	3. Persentase layanan air bersih	Jumlah KK yang mendapat pelayanan air bersih <b>dibagi</b> jumlah seluruh KK X 100%	PDAM	Data KK pengguna air bersih
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	1. Persentase luasan RTH	Luasan ruang terbuka hijau <b>dibagi</b> luasan wilayah X 100%	- Dinas Kebersihan dan Pertamanan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Data/profil ruang terbuka hijau Kota Malang
	2. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	Jumlah pelanggaran tata ruang yang tertangani dibagi jumlah seluruh pelanggaran tata ruang X 100% Penjelasan : Pelanggaran tata ruang yang tertangani yaitu pelanggaran yang sudah ditindak mulai dari surat peringatan sampai dengan proses penyidikan	- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan - Satpol PP	Hasil kegiatan pembinaan OKP
	3. % luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya	Jumlah pemanfaatan ruang yang telah sesuai dg peruntukannya dibagi jumlah seluruh wilayah yang telah dimanfaatkan x 100%  Penjelasan : Kriteria sesuai peruntukannya adalah wilayah tersebut telah digunakan/dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**MISI 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi	Inspektorat	Laporan hasil penetapan WBK oleh Kementerian PAN dan RB
	2. Nilai SAKIP Kota Malang	Nilai Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Malang	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Inspektorat - Bagian Organisasi	Laporan hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB
	3. Opini BPK	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD)	- Inspektorat - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan hasil audit LKD oleh BPK
Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Bagian Organisasi	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

## II. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

### 1. SEKRETARIAT DAERAH

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Sekretariat Daerah yang mampu memberikan Pelayanan Prima dalam Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi	Jumlah rencana aksi yang dilaksanakan <b>dibagi</b> jumlah seluruh rencana aksi X 100% Penjelasan : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) ada 4 area perubahan meliputi Sumber Daya Aparatur, Penataan Peraturan Perundangan, Pengawasan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 13 Program.	Bagian Organisasi	Hasil Monev Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
Meningkatnya kualitas Organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	SOP Jumlah SOP penyelenggaraan pemerintahan yang telah diterapkan <b>dibagi</b> jumlah keseluruhan SOP penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditetapkan X 100% <b>Penjelasan :</b> Kriteria diterapkan adalah telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi baik unit kerja maupun pelaksana serta telah dilakukan evaluasi minimal satu kali dalam setahun oleh 102 unit kerja/SKPD	Bagian Organisasi	Hasil Monev penyelenggaraan pelayanan publik



KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah
Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama	a. Cakupan modin, guru ngaji, dan guru sekolah minggu penerima tunjangan	Jumlah modin, guru ngaji, dan guru sekolah minggu penerima tunjangan <b>dibagi</b> jumlah seluruh modin yang terdaftar X 100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Daftar penerima tunjangan
	b. Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan	Jumlah tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan <b>dibagi</b> jumlah keseluruhan tempat ibadah X 100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Daftar tempat ibadah penerima bantuan perbaikan
Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah	a. Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat	Jumlah Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat <b>dibagi</b> jumlah keseluruhan Peraturan Daerah yang tercantum dalam program legislasi daerah X 100%	Bagian Hukum	Program Legislasi Daerah
	b. Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah	Jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang telah dipublikasikan pada masyarakat dan aparatur pemerintah <b>dibagi</b> jumlah seluruh peraturan perundang-undangan daerah X 100%	Bagian Hukum	Hasil kegiatan publikasi peraturan perundang-undangan daerah

## 2. SEKRETARIAT DPRD

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya pelayanan prima Sekretariat DPRD Kota Malang sebagai fasilitator dan mediator pada kegiatan DPRD Kota Malang</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan fasilitas dan Pelayanan Umum, Keuangan, Risalah dan Kehumasan Kepada DPRD Kota Malang</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang	Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Kegiatan	Survey Kepuasan Pimpinan dan Anggota DRDP	Bagian Umum	Hasil Survey Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD
Terwujudnya Peningkatan Kinerja DPRD Kota Malang	Persentase kegiatan reses Pimpinan dan anggota DPRD yang dipublikasi	Jumlah kegiatan reses Pimpinan dan anggota DPRD yang dipublikasi dibagi seluruh kegiatan reses x 100%  Penjelasan :  Dipublikasikan adalah pemberitaan kegiatan reses pada media cetak atau media elektronik	Bagian Humas	Laporan hasil reses

### 3. INSPEKTORAT

<b>VISI</b>	: Terwujudnya Aparatur dan Hasil Pengawasan Internal Yang Profesional dan Berkualitas Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Yang Prima
<b>MISI</b>	: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Aparatur dan Hasil Pengawasan Internal Yang Profesional dan Berkualitas Untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Yang Akuntabel

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Hasil Pengawasan Yang Berkualitas	a. Persentase SKPD yang menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Standar Pelayanan SKPD yang sesuai ketentuan dibagi Jumlah seluruh Standar Pelayanan SKPD yang dievaluasi x 100%  Penjelasan : - Penyelenggaraan Standar Pelayanan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 dan PP No. 96 Tahun 2015 serta Permenpan & RB No. 15 Tahun 2015  - Pengukuran dilakukan menggunakan Surat Keputusan Inspektur No. 800/03/35.73.401/2014 tentang kuisisioner Pelayanan Publik SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang	Inspektur Pembantu & Sekretaris	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	b. Persentase SPIP SKPD yang memadai	<p>Jumlah SPIP SKPD yang memadai dibagi jumlah seluruh SPIP SKPD yang dievaluasi x 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPIP SKPD yang memadai adalah SPIP yang sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Malang No. 39 Tahun 2010</li> <li>- Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Peraturan Walikota No. 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Malang (Daftar Uji SPIP)</li> </ul>	Inspektur Pembantu	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
	c. Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B	Jumlah SKPD yg nilai SAKIP nya B dibagi jumlah seluruh SAKIP SKPD yang dievaluasi X 100%	Inspektur Pembantu	Ikhtisar Hasil Evaluasi SAKIP
	d. Persentase SKPD Yang Menindak lanjuti Temuan Pengawasan	$\frac{\text{Jml SKPD yang menindaklanjuti temuan Inspektorat}}{\text{Jml SKPD Yang Diperiksa}} \times 100\%$	Inspektur Pembantu & Sekretaris	Buku Laporan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	e. Persentase Penurunan Jumlah Temuan Internal dan Eksternal	$\frac{(jml\ temuan\ audit\ int.\ tahun\ n - 1) - (jml\ temuan\ audit\ int.\ tahun\ n)}{jumlah\ temuan\ int.\ tahun\ n - 1} \times 100\%$	Inspektur Pembantu	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
		$\frac{(jml\ temuan\ audit\ eks.\ tahun\ n - 1) - (jml\ temuan\ audit\ eks.\ tahun\ n)}{jumlah\ temuan\ eks.\ tahun\ n - 1} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
	f. Persentase Kasus Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	$\frac{Jumlah\ Kasus\ Pengaduan\ Yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Kasus\ Pengaduan\ Yang\ Masuk} \times 100\%$	Inspektur Pembantu	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus
	g. Persentase Temuan BPK RI Yang Ditindaklanjuti	$\frac{Jml\ Temuan\ BPK\ Yang\ Ditindaklanjuti}{Jml.\ temuan\ BPK\ Seluruhnya} \times$	Sekretaris	Buku Pemantauan Penyelesaian TLHP BPK-RI

#### 4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

<b>VISI</b>	<b>: TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN HANDAL</b>
<b>MISI</b>	<b>: MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG AKUNTABEL, KONSISTEN DAN IMPLEMENTATIF</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah sesuai tahapan yang benar	Persentase SKPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	Jumlah SKPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras dibagi Jumlah SKPD dikali 100%  <b>Penjelasan :</b> <b>a.</b> Dokumen perencanaan pembangunan yang dimaksud meliputi Renstra, Renja/RKT/RKA <b>b.</b> kondisi baik, konsisten dan selaras dibuktikan dengan hasil evaluasi LAKIP oleh inspektorat minimal B	Bidang Pendataan dan Evaluasi	Laporan evaluasi LAKIP Inspektorat
Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik	Jumlah SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik <b>dibagi</b> Jumlah SKPD <b>dikali</b> 100%  <b>Penjelasan :</b> yang dimaksud dengan dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas	Bidang Pendataan dan Evaluasi	Laporan Hasil Evaluasi Renstra dan Renja/RKT SKPD

		<p>baik adalah dokumen Renstra dan Renja/RKT yang :</p> <p>a. berorientasi pada <i>outcome</i></p> <p>b. indikator kinerjanya bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, terkait langsung pada hasil dan terbatas waktu</p> <p>c. target yang ditetapkan rasional, optimis dan memenuhi asas kepatutan</p>		
	b. Persentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT	Jumlah SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT <b>dibagi</b> Jumlah SKPD <b>dikali</b> 100%	Bidang Pendataan dan Evaluasi	Hasil evaluasi RKA SKPD
	c. Persentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	Jumlah indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi <b>dibagi</b> Jumlah indikator sasaran pada RKPD <b>dikali</b> 100%	Bidang Pendataan dan Evaluasi	Laporan Hasil Evaluasi RKPD
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah	Persentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi	Luas wilayah yang peruntukannya sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi <b>dibagi</b> luas wilayah Kota Malang <b>dikali</b> 100%	Bidang Tata Kota	Laporan Hasil Monitoring Pemanfaatan Ruang Wilayah

## 5. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Berkualitas dan Profesional Guna Mendukung Pelayanan Publik Yang Prima</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan pelayanan administrasi dan kualitas sumberdaya aparatur Pemerintah Daerah</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian	1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Sekretariat	Kuesioner SKM
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1. Prosentase Penempatan pejabat struktural sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya	$\frac{\sum \text{Penempatan Pejabat Struktural sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya}}{\sum \text{Pejabat Struktural yang ada}} \times 100\%$	Bidang Mutasi	Tim Baperjakat
	2. Prosentase Pegawai yang disiplin	$\frac{\sum \text{Pegawai yang tidak melanggar disiplin pegawai}}{\sum \text{Seluruh Pegawai}} \times 100\%$	Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai	Rekapitulasi Jumlah Pelanggaran Disiplin



<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	3. Prosentase pemuktahiran data	$\frac{\sum \text{data pegawai yang dimutahirkan}}{\sum \text{Seluruh pegawai yang ada}} \times 100\%$	Bidang Formasi dan Informasi	1. Hasil verifikasi data 2. Hasil peremajaan data 3. Hasil entri data 4. Hasil PUPNS
	4. Prosentase PNS dengan nilai capaian SKP baik	$\frac{\sum \text{Pegawai dengan nilai capaian SKP baik}}{\sum \text{Seluruh Pegawai}} \times 100\%$	Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai	Rekapitulasi nilai capaian SKP
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional	1. Prosentase pejabat struktural yang lulus Diklat Kepemimpinan	$\frac{\sum \text{Pejabat struktural yang lulus diklat pim}}{\sum \text{pejabat struktural yang ada}} \times 100\%$	Bidang Diklat	Rekapitulasi data pejabat Ess. Yang mengikuti diklat pim dan lulus berdasarkan data simpeg BKD
	2. Prosentase PNS dan lulus Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	$\frac{\sum \text{PNS yang lulus Diklat Teknis dan Diklat Fungsional}}{\sum \text{Seluruh PNS}} \times 100\%$	Bidang Diklat	Hasil Penyelenggaraan /Pengiriman Diklat Teknis dan Fungsional

## 6. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional dan Akuntabel</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional dan Akuntabel</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase realisasi belanja langsung SKPD $\geq 90\%$	Jumlah SKPD yang realisasi belanja langsung $\geq 90$ <b>dibagi</b> jumlah seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Malang x 100%	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Laporan Keuangan SKPD
Meningkatnya tertib penatausahaan pengelolaan aset daerah	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat	Jumlah bidang lahan aset daerah yang sudah bersertifikat <b>dibagi</b> jumlah seluruh bidang aset daerah x 100%	Bidang Pemanfaatan Aset Daerah	Neraca Pemerintah Daerah

**7. BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk serta Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Produktivitas, Kemandirian dan Kesejahteraan</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan masyarakat miskin	a. Cakupan masyarakat miskin yang mendapat pelatihan keterampilan	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelatihan keterampilan <b>dibagi</b> jumlah masyarakat miskin x 100%	Bidang Pembangunan Masyarakat	- Data pelatihan keterampilan - BPS

<b>MISI 2</b>	<b>: Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
---------------	--

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	a. Persentase penanganan kasus tindakan KDRT	Jumlah kasus KDRT yang ditangani <b>dibagi</b> jumlah keseluruhan kasus KDRT x 100%	Bidang PP dan PA	Rekapitulasi hasil penanganan kasus KDRT
	b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah laporan pengaduan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu <b>dibagi</b> jumlah pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu dikali 100%	Bidang PP dan PA	Laporan Capaian SPM

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	c. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/ PKT di RS	Jumlah korban KDRT yang mendapat pelayanan kesehatan <b>dibagi</b> jumlah korban KDRT yang datang ke Puskesmas dikali 100%	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Laporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan pada perempuan dan anak korban kekerasan

**MISI 3 : Meningkatkan Pengendalian Penduduk Menuju Kualitas Keluarga Sehat dan Sejahtera**

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	1. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif	Jumlah peserta KB aktif <b>dibagi</b> jumlah PUS x 100%	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Hasil monev pencapaian SPM bidang Keluarga Berencana
	2. Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah anak <b>dibagi</b> jumlah keluarga	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Hasil monev kegiatan pemberdayaan keluarga

## 8. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Masyarakat Kota Malang Yang Tenram, Berwawasan Kebangsaan dan Demokratis</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan ketentraman dengan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban	Persentase jumlah konflik (antar kelompok pemuda, pelajar / mahasiswa, dan antar kampung) yang termediasi	Jumlah konflik (antar kelompok pemuda pelajar/mahasiswa, dan antar kampung) yang dimediasi dalam setahun dibagi jumlah seluruh konflik (antar kelompok pemuda pelajar/mahasiswa, dan antar kampung) yang terjadi X100%	Bidang Kewaspadaan Daerah	Laporan Bidang Kewaspadaan Daerah
	Persentase kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan	Jumlah kerusuhan yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh kerusuhan X 100%	Bidang Kewaspadaan Daerah	Laporan Bidang Kewaspadaan Daerah
	Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar Umat Beragama yang ditindaklanjuti	Jumlah kesepakatan hasil pertemuan antar Umat Beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh kesepakatan hasil pertemuan antar Umat Beragama yang ada x 100%	Bidang Integrasi	Laporan Bidang Integrasi

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya pendidikan politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada masyarakat	Persentase keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif	Jumlah anggota DPRD perempuan dibagi jumlah seluruh anggota DPRD X 100%	Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga	Laporan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga
	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif di bagi total pemilih X 100%	Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga	Laporan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga
	Persentase partisipasi pemilih dalam Pilpres	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dibagi total pemilih X 100%	Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga	Laporan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga
	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilukada	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Kepala Daerah di bagi total pemilih X 100%	Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga	Laporan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga

## 9. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pengelolaan, Pelestarian dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Kota Malang</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya penerapan peraturan dan kebijakan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Lebih Baik.	Prosentase perusahaan dan/atau kegiatan usaha yang memiliki Ijin Lingkungan.	Jumlah perusahaan dan/atau kegiatan usaha yang memiliki Ijin Lingkungan <b>dibagi</b> jumlah perusahaan dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Ijin Lingkungan X 100 %.	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran	Data Perusahaan yang memiliki ijin

<b>MISI 2</b>	<b>: Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam</b>
---------------	---

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya upaya konservasi sumber daya alam guna menjaga keseimbangan alam dengan merehabilitasi cadangan sumber daya alam.	Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya.	Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya <b>dibagi</b> jumlah seluruh luasan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa x 100%.	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran	Data Luasan Lahan produksi biomassa
	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya.	Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya <b>dibagi</b> jumlah seluruh sumber air X 100%.	BLH	BLH

**MISI 3 : Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup.	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti <b>dibagi</b> Jumlah seluruh pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang masuk X 100%.	BLH	BLH
	Persentase jumlah partisipasi dan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Jumlah kelurahan yang masuk dalam kriteria kelurahan yang bersih dan lestari (BERSERI) <b>dibagi</b> Jumlah kelurahan di Kota Malang X 100%.	BLH	BLH

**MISI 4 : Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Menurunkan potensi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air <b>dibagi</b> jumlah usaha/kegiatan yang diawasi telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air X 100%.	BLH	BLH



KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencemaran udara <b>dibagi</b> Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari X 100%.	BLH	BLH
	Persentase jumlah titik pantau udara ambient dalam rangka pencegahan pencemaran udara.	Jumlah titik pantau udara ambient yang dipantau <b>dibagi</b> Jumlah total titik pantau udara ambient X 100%.	BLH	BLH
	Persentase jumlah pengujian emisi kendaraan bermotor dalam rangka pencegahan pencemaran udara.	Jumlah kendaraan bermotor yang memenuhi standar uji emisi <b>dibagi</b> Jumlah total kendaraan bermotor yang diuji.	BLH	BLH
	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun <b>dibagi</b> Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dipantau x 100%.	BLH	BLH
	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Dokumen Kajian Lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL) dan Izin Lingkungan.	Jumlah kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan <b>dibagi</b> Jumlah total usaha dan/atau kegiatan X 100%.	BLH	BLH

## 10. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Cepat dan Akuntabel</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan Mutu Pelayanan Perizinan yang adil, terukur, berkualitas dan Akuntabel</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang adil, terukur, berkualitas dan akuntabel	1. Persentase IMB yang diselesaikan tepat waktu	$I_{tw} = \text{izin tepat waktu}$ $I_m = \text{izin masuk}$ $\% = \frac{\sum I_{tw}}{\sum I_m} \times 100 \%$	Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum, Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian, dan Bidang Pelayanan Perizinan Persosbud	Data SIM Perizinan
	2. Persentase IG yang diselesaikan tepat waktu			
	3. Persentase Reklame permanen yang diselesaikan tepat waktu			
	4. Persentase SIUP yang diselesaikan tepat waktu			
	5. Persentase TDUP yang diselesaikan tepat waktu			

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	6. Rata-rata waktu penyelesaian IMB	$\text{rata2 wkt} = \frac{\sum \text{wkt penyelesaian izin}}{\sum \text{izin yg diselesaikan}}$	Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum	
	7. Rata-rata waktu penyelesaian IG			
	8. Persentase Penurunan Pengaduan	$\% = \frac{P_{n-1} - P_n}{P_{n-1}}$	Sub Bagian Umum	Pengaduan Masy yang masuk
	9. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) :	Nilai SKM	Sub Bagian Sungram	Survey Kepuasan Masyarakat
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap IMB			
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap IG			
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Izin Usaha Angkutan				
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Reklame Permanen				

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Reklame Insidentil			
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Izin Trayek			
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Izin Usaha Jasa Konstruksi			
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Izin Penyelenggaraan Tontonan			
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Izin Usaha Perdagangan			
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Tanda Daftar Usaha Pariwisata			
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Izin Usaha Perindustrian			
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Gedung Gajayanan dan Wisma Tamu			
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Izin Operasional Jasa Medik Veteriner			

## 11. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Kota Malang yang tanggap, tangkas, dan tangguh menghadapi bencana</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Melindungi masyarakat Kota Malang dari risiko bencana melalui mitigasi bencana</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Peningkatan kerjasama lintas seKtor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiap siagaan unsur – unsur penanggulangan bencana	Persentase menurunnya kejadian bencana	$\frac{\text{Jumlah bencana tahun } (x) - \text{Jumlah bencana tahun } (x - 1)}{\text{Jumlah bencana tahun } (x - 1)} \times 100\%$	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Hasil survey

<b>MISI 2</b>	<b>: Mengembangkan management kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana</b>
---------------	--

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku	a. Rata – rata waktu tanggap ( <i>respond time</i> )bencana (Target < 1 jam)	$\frac{\text{Jumlah } \textit{respond time} \text{ seluruh kejadian bencana}}{\text{Jumlah kejadian bencana}}$	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Laporan pelaksanaan kegiatan

**MISI 3 : Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur, dan akuntabel**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non-fisik	a. Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi pascabencana (Target = 25%)	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang direhabilitasi}}{\text{Jumlah sarana prasarana yang rusak terkena bencana}} \times 100\%$	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Laporan pelaksanaan kegiatan
	b. Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana (Target = 80%)	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Sekretariat	Survey / Questionnaire

## 12. DINAS PENDIDIKAN

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Insan Kota Malang yang Cerdas, Bermartabat dan Mampu Bersaing di Era Global</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Mewujudkan Pendidikan Kota Malang Yang Berkualitas dan Terjangkau Bagi Masyarakat</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis	a. Angka Lulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	$\frac{\text{Jumlah siswa lulus}}{\text{Jumlah siswa mengikuti ujian nasional}} \times 100\%$	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah, Dapodik
	b. Angka partisipasi murni - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	$\frac{\text{Jumlah siswa usia sekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah}} \times 100\%$	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah, Dapodik
	c. Angka partisipasi kasar - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	$\frac{\text{Jumlah siswa}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah}} \times 100\%$	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah, Dapodik
	d. Angka putus sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	$\frac{\text{Jumlah siswa putus sekolah}}{\text{Jumlah siswa}} \times 100\%$	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah, Dapodik

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	e. Angka melanjutkan - Dari SD/MI ke SMP/MTs - Dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	$\frac{\text{Jumlah siswa baru yang diterima}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah, Dapodik
	f. Persentase sekolah dengan Kondisi bangunan kelas baik - SD/MI - SMP/MTS - SMA/MA/SMK	$\frac{\text{Jumlah sekolah dengan kondisi bangunan kelas baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah}} \times 100\%$	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah, Dapodik
	g. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs	<p>Jumlah anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah sampai dengan SMP/MTs dibagi jumlah seluruh anak usia sekolah sampai dengan SMP/MTs dari keluarga pra sejahtera X 100%</p> <p>Penjelasan :            Kriteria pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai keluarga sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan</p>	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data penerima BOSDA



<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	1. Rasio guru / murid per kelas - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	$\frac{\text{Jumlah Guru per kelas}}{\text{Jumlah Murid}}$	Bidang SD & PKLK ; Bidang SMP, SMA & SMK ; Bidang Fungsional Kependidikan	Data Individu Sekolah, Dapodik
	2. Persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	Jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah seluruh guru X 100%	Bidang Fungsional Kependidikan	Data Individu Sekolah, Dapodik
Meningkatnya Akses Pendidikan Non Formal dan Informal serta pendidikan luar sekolah	a. APK PAUD	$\frac{\text{Jumlah peserta PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 0 - 6 tahun}} \times 100\%$	Bidang PNFI	Data Individu Sekolah, Dapodik
	b. Angka Melek Huruf	$\frac{100\% - (\text{Jumlah Buta Aksara})}{(\text{Jumlah Penduduk Usia 15-45 Thn})} \times 100\%$	Bidang PNFI	BPS, Data KF
Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai SKM	Semua Bidang dan Sekretariat	Nilai SKM

### 13. DINAS KESEHATAN

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Kota Malang Yang Bermartabat</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Malang</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUN G JAWAB</b>	
Pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu	1	Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	Jumlah pemakaian obat dan perbekalan kesehatan setahun ditambah sisa obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia dibagi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dalam setahun x 100%	Laporan tribulan kesetersediaan obat	Bidang Farmakmin
	2	Terpenuhinya ketersediaan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan	Jumlah alat kesehatan yang tersedia dibagi jumlah alat kesehatan sesuai kebutuhan X 100 %	Laporan semester inventaris alat kesehatan	Bidang Farmakmin
Setiap orang miskin mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 <b>dibagi</b> jumlah seluruh masyarakat miskin X 100%	Laporan Puskesmas, Laporan Dinas Kesehatan, Laporan Dinas Sosial	Bidang Binkesmas
Setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi	4	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 <b>dibagi</b> jumlah sasaran ibu	LB3, SIRS, Kohort Ibu, PWS - KIA	Bidang Pelayanan

terlindungi dari penyakit			hamil X 100 %		Kesehatan
	5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive <b>dibagi</b> jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan X 100 %	LB3, SIRS, Laporan AMP	Bidang Pelayanan Kesehatan
	6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan <b>dibagi</b> jumlah seluruh sasaran ibu bersalin X 100 %	LB3, SIRS	Bidang Pelayanan Kesehatan
	7	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	Jumlah Ibu Nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar <b>dibagi</b> jumlah seluruh ibu nifas X 100 %	LB3, SIRS, Kohort LB 3 Ibu, PWS - KIA	Bidang Pelayanan Kesehatan
	8	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani <b>dibagi</b> jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada X 100 %	LB3, SIRS, Laporan AMP	Bidang Pelayanan Kesehatan
	9	Cakupan kunjungan bayi	Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar <b>dibagi</b> jumlah seluruh bayi yang lahir hidup X 100 %	Kohort bayi, SIRS dan klinik	Bidang Pelayanan Kesehatan

	10	Cakupan pelayanan anak balita	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali <b>dibagi</b> jumlah seluruh anak balita X 100 %	Kohort Balita, Laporan rutin SKDN, Buku KIA, KMS, Pencatatan pada Pos PAUD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	11	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk yang dirawat <b>dibagi</b> jumlah balita gizi buruk yang ditemukan X 100 %	Laporan KLB Gizi buruk Puskesmas dan RS, LB 3 SIMPUS, SIRS-W1	Bidang Binkesmas
Menurunnya angka kesakitan , kecacatan dan kematian akibat penyakit	12	Penderita DBD yang ditangani	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP <b>dibagi</b> jumlah penderita DBD yang ditemukan X 100 %	SIMPUS, SIRS	Bidang P2PL
	13	Penderita HIV/AIDS yang ditangani	Jumlah penderita HIV/AIDS ditangani sesuai SOP <b>dibagi</b> jumlah penderita HIV/AIDS yang ditemukan x 100%	SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS)	Bidang P2PL
	14	Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah desa/ kelurahan UCI <b>dibagi</b> jumlah desa/ kelurahan X 100 %	SIMPUS, SIRS dan klinik	Bidang P2PL
	15	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Jumlah KLB di Kelurahan yang ditangani < 24 jam <b>dibagi</b> jumlah KLB di kelurahan yang terjadi X 100 %	Laporan KLB 24 jam (W1), Laporan Hasil Penyelidikan dan penanggulangan KLB	Bidang P2PL
Terwujudnya lingkungan hidup	16	Kelurahan mengikuti program kota sehat	Jumlah kelurahan yang mengikuti program Kota Sehat	Profil Kesehatan Kota Malang	Bidang P2PL

yang bersih dan sehat					
Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, dan peran serta aktif masyarakat di bidang kesehatan	17	Rasio Posyandu per satuan Balita	Jumlah Posyandu X 1000 <b>dibagi</b> Jumlah Balita	Profil Kesehatan Kota Malang, Laporan Kinerja Posyandu	Bidang Binkesmas
	18	Cakupan kelurahan siaga aktif	Jumlah kelurahan siaga yang aktif <b>dibagi</b> jumlah kelurahan siaga yang dibentuk X 100 %	Hasil pencatatan kegiatan Puskesmas	Bidang Binkesmas
Terpantaunya mutu, keamanan pangan, sarana peredaran obat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan kosmetika	19	Cakupan sarana obat yang diawasi dan memenuhi syarat/ standar	Jumlah sarana obat yang diawasi dan memenuhi syarat dibagi jumlah sarana obat x 100%	Laporan hasil pengawasan/monitoring sarana obat	Bidang Farmakmin

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu	a. Jumlah puskesmas yang memiliki fasilitas HIV Counseling and testing (HCT) dan Infeksi menular seksual (IMS)	Jumlah puskesmas yang memiliki fasilitas HIV Counseling and testing (HCT) dan Infeksi menular seksual (IMS)	Bidang P2PL	Profil kesehatan Kota Malang, Data Kependudukan
	b. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (tiap 1000 penduduk)	Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu X 1.000 <b>dibagi</b> jumlah penduduk	Bidang Pelayanan Kesehatan	Profil kesehatan Kota Malang, Data Kependudukan
	c. Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)	Jumlah dokter puskesmas X 1.000 <b>dibagi</b> jumlah penduduk	Bidang Pelayanan Kesehatan	Profil kesehatan Kota Malang, Data Kependudukan
	d. Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)	Jumlah tenaga paramedis X 1.000 <b>dibagi</b> jumlah penduduk	Bidang Pelayanan Kesehatan	Profil kesehatan Kota Malang, Data Kependudukan
	e. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 <b>dibagi</b> jumlah	Bidang Binkesmas	Laporan Puskesmas, Laporan Dinas

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		seluruh masyarakat miskin X 100%		Kesehatan, Laporan Dinas Sosial
	f. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 2 dan strata 3 <b>dibagi</b> jumlah seluruh masyarakat miskin X 100%	Bidang Binkesmas	Laporan Rumah Sakit, Laporan Dinas Kesehatan
	g. Jumlah puskesmas yang berstandar ISO 9001 : 2008 atau terakreditasi	Jumlah puskesmas yang berstandar ISO 9001 : 2008 atau terakreditasi	Bidang Pelayanan Kesehatan	Profil Kesehatan Kota Malang
	h. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/ Kota	Pelayanan gawat darurat level 1 <b>dibagi</b> jumlah RS Kab/ Kota x 100 %	Bidang Pelayanan Kesehatan	Laporan Rumah Sakit, Laporan Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretariat	Hasil pengukuran SKM UPT Dinas Kesehatan
Menurunnya angka kematian ibu dan anak	a. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 <b>dibagi</b> jumlah sasaran ibu hamil X 100 %	Bidang Pelayanan Kesehatan	LB3, SIRS, Kohort Ibu, PWS - KIA
	b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive <b>dibagi</b> jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan X	Bidang Pelayanan Kesehatan	LB3, SIRS, Laporan AMP

	100 %		
--	-------	--	--

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan <b>dibagi</b> jumlah seluruh sasaran ibu bersalin X 100 %	Bidang Pelayanan Kesehatan	LB3, SIRS
	d. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	Jumlah Ibu Nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar <b>dibagi</b> jumlah seluruh ibu nifas X 100 %	Bidang Pelayanan Kesehatan	LB3, SIRS, Kohort LB 3 Ibu, PWS - KIA
	e. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani <b>dibagi</b> jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada X 100 %	Bidang Pelayanan Kesehatan	LB3, SIRS, Laporan AMP
	f. Cakupan kunjungan bayi	Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar <b>dibagi</b> jumlah seluruh bayi yang lahir hidup X 100 %	Bidang Pelayanan Kesehatan	Kohort bayi, SIRS dan klinik
	g. Cakupan pelayanan anak balita	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali <b>dibagi</b> jumlah seluruh anak balita X 100 %	Bidang Pelayanan Kesehatan	Kohort Balita, Laporan rutin SKDN, Buku KIA, KMS, Pencatatan pada Pos PAUD



KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	h. Cakupan peserta KB aktif	Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu <b>di bagi</b> seluruh PUS di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama X 100 %	Bidang Pelayanan Kesehatan	SIMPUS, SIRS, Formulir 2 KB
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	Jumlah balita usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin yang mendapat MPASI <b>dibagi</b> jumlah seluruh balita usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin X 100%	Bidang Binkesmas	Laporan khusus MP-ASI, R-1 Gizi, LB3 SIMPUS
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk yang dirawat <b>dibagi</b> jumlah balita gizi buruk yang ditemukan X 100 %	Bidang Binkesmas	Laporan KLB Gizi buruk Puskesmas dan RS, LB 3 SIMPUS, SIRS-W1
Menurunnya angka kesakitan , kecacatan dan kematian akibat penyakit	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit a. Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan <b>dibagi</b> jumlah penduduk usia < 15 tahun X 100.000	Bidang P2PL	Form pelacakan FP.1, Laporan W2

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	b. Penemuan penderita pneumonia balita	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani <b>dibagi</b> jumlah perkiraan penderita pneumonia X 100 %	Bidang P2PL	Laporan bulanan puskesmas, medical record RS/ RS Swasta
	c. Penemuan pasien Baru TB – BTA positif	Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati <b>dibagi</b> jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif X 100 %	Bidang P2PL	Pelaporan TB : TB 07, 08, dan 11
	d. Penderita DBD yang ditangani	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP <b>dibagi</b> jumlah penderita DBD yang ditemukan X 100 %	Bidang P2PL	SIMPUS, SIRS
	e. Penemuan penderita Diare	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader <b>dibagi</b> jumlah perkiraan penderita diare X 100 %	Bidang P2PL	Catatan kader , LB 1/ Laporan bulanan / klinik
	f. Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah desa/ kelurahan UCI <b>dibagi</b> jumlah desa/ kelurahan X 100 %	Bidang P2PL	SIMPUS, SIRS dan klinik

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	g. Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Jumlah KLB di Kelurahan yang ditangani < 24 jam <b>dibagi</b> jumlah KLB di kelurahan yang terjadi X 100 %	Bidang P2PL	Laporan KLB 24 jam (W1), Laporan Hasil Penyelidikan dan penanggulangan KLB
Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat	a. Kelurahan mengikuti program kota sehat	Jumlah kelurahan yang mengikuti program Kota Sehat <b>dibagi</b> jumlah kelurahan X 100 %	Bidang P2PL	Profil Kesehatan Kota Malang
Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, dan peran serta aktif masyarakat di bidang kesehatan	a. Rasio Posyandu per satuan Balita	Jumlah Posyandu X 1000 <b>dibagi</b> Jumlah Balita	Bidang Binkesmas	Profil Kesehatan Kota Malang, Laporan Kinerja Posyandu
	b. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya <b>dibagi</b> jumlah murid SD dan setingkat x 100 %	Bidang Binkesmas	Laporan kegiatan UKS
	c. Cakupan desa siaga aktif	Jumlah desa siaga yang aktif <b>dibagi</b> jumlah desa siaga yang dibentuk X 100 %	Bidang Binkesmas	Hasil pencatatan kegiatan Puskesmas
Terwujudnya ketersediaan obat dan sediaan farmasi yang bermutu dan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian	Ketersediaan obat untuk sarana milik Pemerintah Kota Malang	Jumlah pemakaian obat setahun ditambah sisa obat yang tersedia <b>dibagi</b> kebutuhan obat dalam setahun X 100 %	Bidang Farmakmin	Laporan tribulan kesetersediaan obat



KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terpantaunya mutu, keamanan pangan, sarana peredaran obat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan kosmetika	a. Cakupan sampel pangan yang diambil dari peredaran	Jumlah sampel yang diuji laboratorium <b>dibagi</b> jumlah sampel pangan yang diambil secara acak dari peredaran X 100 %	Bidang Farmakmin	Laporan hasil pengujian sampel makanan dan minuman
	b. Cakupan sarana obat yang diawasi	Jumlah sarana obat yang diawasi <b>dibagi</b> jumlah sarana obat x 100 %	Bidang Farmakmin	Laporan kegiatan pengawasan tahunan, Profil Kesehatan Kota Malang

#### 14. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya pelayanan pembinaan kepemudaan dan olahraga yang berkualitas</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan pelayanan pembinaan kepemudaan dan olahraga yang intensif, produktif dan inovatif</b>

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif	Prosentase pemuda binaan yang berwirausaha	Jumlah pemuda binaan yang berwirausaha dibagi jumlah seluruh pemuda binaan x 100%	Bidang kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga	Data Pemuda Binaan
	Prosentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	jumlah pemuda peserta kegiatan dibagi jumlah seluruh pemuda kota malang x 100%	Bidang Pemberdayaan Pemuda	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
	Prosentase pemuda kota malang yang lolos seleksi kegiatan kepemudaan tingkat propinsi	jumlah pemuda kota malang yang lolos seleksi dibagi jumlah peserta seleksi tingkat provinsi asal Kota Malang x 100%	Bidang Pemberdayaan Pemuda	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Meningkatnya kualitas pembinaan olahraga yang intensif dan berkelanjutan	Peringkat kota malang dalam event keolahragaan tingkat provinsi	peringkat kota malang dalam event keolahragaan tingkat provinsi	Bidang Pengembangan Olahraga	Laporan pelaksanaan kegiatan
	Prosentase peningkatan jumlah medali emas yang diperoleh pada even olahraga tingkat provinsi	Jumlah perolehan medali emas tahun n dikurangi jumlah perolehan tahun n-1 dibagi jumlah perolehan medali emas tahun n-1 x 100%	Bidang Pengembangan Olahraga	Laporan pelaksanaan kegiatan
	Prosentase cabor berprestasi tingkat provinsi	jumlah cabor yang berprestasi pada tingkat propinsi dibagi jumlah cabor yang mengikuti kejuaraan pada tingkat propinsi x 100% Penjelasan : Cabor yang berprestasi adalah Cabang Olahraga yang memperoleh Medali	Bidang Pengembangan Olahraga	Laporan pelaksanaan kegiatan

## 15. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Prima, Adil, Terukur, Transparan, Berbudaya dan Bersih</b>
<b>MISI</b>	<b>: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Persentase Keluarga yang memiliki KK terupdate	Jumlah Kartu Keluarga ( KK ) yang diterbitkan pada tahun (x) di bagi jumlah Kepala Keluarga dalam satu wilayah pada tahun (x) di kalikan 100% .	Bidang Kependudukan	Database Kependudukan
	2. Persentase penduduk yang ber KTP	Jumlah KTP yang diterbitkan pada tahun (x) di bagi jumlah penduduk wajib KTP pada tahun (x) di kalikan 100 %  Penjelasan :  Tertanggal 31 Desember 2014 KTP Non Elektronik/KTP SIAK sudah tidak berlaku sehingga yang akan dihitung IKU nya adalah KTP Elektronik	Bidang Kependudukan	Database Kependudukan
	3. Persentase penduduk yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun (x) di bagi jumlah lahir hidup pada tahun (x) di kalikan 100%	Bidang Pencatatan Sipil	Database Kependudukan

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	4. Persentase penduduk yang meninggal yang diterbitkan Kutipan Akta Kematian	Jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan sampai dengan tahun (x) di bagi jumlah penduduk yang meninggal pada tahun (x) di kalikan 100%	Bidang Pencatatan Sipil	Database Kependudukan
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase responden yang puas terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah responden yang menyatakan puas pada tahun (x) dibagi jumlah responden yang disurvei pada tahun (x) dikalikan 100%	Bidang Informasi dan Sekretariat	Hasil survey/ kuisisioner responden/ penerima layanan



**16. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN**

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan kualitas Infrastruktur Perkotaan</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas jalan	Persentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik	Panjang jalan kota dalam kondisi baik / Total panjang jalan x 100%	Bidang Bina Marga	Data Base
	Persentase Jembatan Kota dalam Kondisi Baik	Jembatan kota dalam kondisi baik / Total jembatan kota x 100%	Bidang Bina Marga	Data Base
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air	Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik	Jumlah Drainase Kota dalam kondisi baik / Total Drainase Kota x 100%	Bidang Bina Marga	Data Base
Meningkatnya pengujian mutu bahan dan perbengkelan	Persentase produk (kegiatan) yang lolos uji mutu	Jumlah produk kegiatan yang lolos uji mutu / Jumlah total kegiatan x 100%	UPT UMBBP	Data Base

**MISI 2 : Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana Dan Prasarana Permukiman, Gedung Daerah Dan Fasilitas Umum Serta Penanggulangan Bencana Kebakaran**

<b>KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman	Prosentase Layanan Air Bersih	Jumlah KK yang mendapat Pelayanan Air bersih / Jumlah KK se-Kota Malang x 100%	Bidang Perumahan Dan Tata Ruang	Data Base
	Prosentase penurunan Luasan kawasan kumuh	Luasan kawasan kumuh Kota Malang tahun n dikurangi luasan kawasan kumuh n-1 dibagi luasan kawasan kumuh tahun n-1 x 100%	Bidang Perumahan Dan Tata Ruang	Data Base
Meningkatnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Rata-rata tingkat waktu tanggap (response time rate)	Jumlah pengaduan yang sesuai dengan response time rate dibagi jumlah total pengaduan x 100% Penjelasan : Response time rate adalah 15 menit (sesuai spm)	Upt Pemadam Kebakaran	Laporan Kegiatan

**MISI 3 : Terwujudnya Kesesuaian Penataan Ruang Dan Bangunan**

<b>KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	Pelanggaran tata ruang yang tertangani / Jumlah pelanggaran tata ruang x 100 %	Bidang Penataan Dan Pengawasan Bangunan	Data Bidang
Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretariat	Data Survei

## 17. DINAS PERHUBUNGAN

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Sistem Transportasi handal dan terintegrasi</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	a. Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	Ruas jalan yang memenuhi standart keselamatan lalu lintas dibagi ruas jalan yg ada x100%  Penjelasan : Yang dimaksud memenuhi standar keselamatan lalu lintas yaitu yang terpasang rambu, marka, guardril dan penerangan jalan	Bidang Lalu lintas	Data Perlengkapan Lalu Lintas
	b. Persentase angkutan umum yang laik jalan	Angkutan umum yang lulus uji kir dibagi angkutan umum yang seharusnya uji kir dikali 100 %	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Laporan Hasil Uji Kendaraan Bermotor
	c. Persentase menurunnya pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang	Jumlah kendaraan yang melanggar laik jalan tahun lalu dikurangi jumlah yang melanggar tahun sekarang dibagi jumlah yg melanggar tahun lalu dikali 100%	Bidang Pengendalian dan Ketertiban	Laporan Pelanggaran Laik Jalan

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	d. Persentase menurunnya pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang	Jumlah kendaraan yang melanggar laik jalan tahun lalu dikurangi jumlah yang melanggar tahun sekarang dibagi jumlah yg melanggar tahun lalu dikali 100%	Bidang Pengendalian dan Ketertiban	Laporan Pelanggaran Laik Jalan
Meningkatnya penggunaan sarana perhubungan	Tingkat utilitas terminal	Jumlah angkutan kota yang masuk terminal dibagi jumlah angkutan kota yang seharusnya masuk terminal dikali 100%	UPT Terminal	Laporan UPT Terminal
Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) ttg keamanan kendaraan umum	Nilai survey kepuasan masyarakat	Sekretariat	Hasil Survey
Meningkatnya Pelayanan parkir yang tertib	a. Persentase menurunnya pelanggaran parkir dikawasan larangan parkir	Jumlah pelanggaran parkir tahun lalu dikurangi pelanggaran parkir tahun ini dibagi dengan Jumlah pelanggaran parkir tahun lalu dikali 100%	Bidang Pengendalian dan Ketertiban	Laporan Jumlah Penindakan Parkir

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	<p>b. Persentase luas jalan untuk parkir tepi jalan yang tertib</p> <p>Penjelasan : Ruas jalan yang sudah tertib adalah ruas jalan yang dipakai parker yang sudah dilengkapi perlengkapan lalu lintas</p>	<p>Jumlah ruas jalan yang sdh tertib dibagi jumlah ruas jalan yang digunakan untuk parkir tepi jalan</p>	<p>Bidang Pengendalian dan Ketertiban</p>	<p>Laporan Pendataan Titik Parkir</p>

## 18. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

VISI	: Terwujudnya industri dan perdagangan yang tangguh dan berdaya saing sebagai sektor penggerak ekonomi yang berkeadilan
MISI	: Meningkatkan kinerja perdagangan dan daya saing industri

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan standarisasi industri	PDRB Sektor industri	PDRB industri non migas atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan	Bidang Industri Agro Kimia dan Bidang Industri ILMETA & IATT	BPS
Meningkatnya penguasaan teknologi dan standarisasi produk industri	a. Persentase Peningkatan produk industri yang berstandarisasi	Jumlah industri yang memiliki produk terstandarisasi/jumlah total industri x 100% <b>Penjelasan :</b> Yang dimaksud dengan industri yang memiliki produk terstandarisasi adalah industri yang sudah memiliki SOP teknis	Bidang Industri Agro Kimia dan Bidang Industri ILMETA & IATT	Laporan monev Disperindag

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	b. Persentase peningkatan industri yang menguasai teknologi	Jumlah industri yang menggunakan teknologi dalam proses produksi /jumlah total industri x 100% <b>Penjelasan :</b> Industri yang menggunakan teknologi dalam proses produksi adalah industri yang $\geq 50\%$ proses produksi dilakukan secara mekanisasi		
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia industri	Peningkatan jumlah IKM yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat kompetensi tahun berjalan - Jumlah IKM yang memiliki sertifikat kompetensi tahun sebelumnya	Bidang Industri Agro Kimia dan Bidang Industri ILMETA & IATT	Laporan monev Disperindag
Meningkatnya inovasi industri	Persentase jumlah IKM yang melakukan inovasi produk	Jumlah industri yang melakukan inovasi produk/jumlah total industri x 100% <b>Penjelasan :</b> Yang dimaksud inovasi adalah pengembangan produk	Bidang Industri Agro Kimia dan Bidang Industri ILMETA & IATT	Laporan monev Disperindag

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya ketersediaan data industri	Pemutakhiran data industri	Updating data industri pada tahun berjalan	Bidang Industri Agro Kimia dan Bidang Industri ILMETA & IATT	Hasil pemutakhiran data industri
	Pengembangan sistem informasi industri	updating konten sistem informasi pada tahun berjalan		
Meningkatkan kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri	PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Perdagangan atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan	Bidang Perdagangan	BPS
Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan	Nilai ekspor bersih perdagangan	Nilai ekspor bersih tahun berjalan	Bidang Perdagangan	data realisasi ekspor
Meningkatnya perluasan pasar dalam dan luar negeri	Peningkatan jumlah daerah tujuan pemasaran dalam negeri	Jumlah daerah tujuan baru pemasaran dalam negeri tahun berjalan	Bidang Perdagangan	Laporan monev Disperindag
	Peningkatan jumlah daerah tujuan pemasaran luar negeri	Jumlah daerah tujuan baru pemasaran luar negeri tahun berjalan		
Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Stabilitas harga bahan pokok dan barang penting lainnya	Tingkat inflasi pada tahun berjalan	Bidang Perdagangan	BPS



<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya ketersediaan data perdagangan	Pemutakhiran data perdagangan	Updating data perdagangan pada tahun berjalan	Bidang Perdagangan	Pemutakhiran data perdagangan
	Pengembangan sistem informasi perdagangan	updating konten sistem informasi pada tahun berjalan		
Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen	Persentase penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	$\frac{\text{jumlah penyelesaian pengaduan konsumen}}{\text{jumlah pengaduan konsumen}} \times 100\%$	Bidang Perlindungan Konsumen	Data sidang BPSK
	Persentase UTTP yang telah ditera dan tera ulang	Jumlah dan jenis UTTP yang ditera dan tera ulang pada tahun berjalan/jumlah total UTTP yang telah terdata x 100%		Data kegiatan tera dan tera ulang
	Persentase ketepatan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapan lainnya	Jumlah ukuran barang non bdkd yang melebihi batas toleransi/jumlah barang non bdkd yang diukur ulang x 100%		Data kegiatan pos ukur
	Persentase penurunan penggunaan bahan berbahaya dalam produk pangan yang diperdagangkan	Jumlah temuan produk pangan yang mengandung bahan berbahaya/jumlah produk pangan yang diuji x 100%		Data kegiatan pengawasan
	Persentase jenis barang beredar yang telah memenuhi ketentuan perdagangan	Jenis barang beredar yang diawasi telah memenuhi ketentuan perdagangan/total jenis barang beredar yang diawasi x 100%		Data kegiatan pengawasan

**19. DINAS KOPERASI DAN UKM**

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Koperasi dan UKM sebagai lembaga usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh dan mandiri</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	<p>Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah seluruh koperasi x 100 %</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan koperasi tersebut pada tahun terakhir melakukan kegiatan usaha</p>	Bidang Kelembagaan	Data Keragaan Koperasi

**MISI 2 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya UKM yang memiliki kemampuan manajemen pengelolaan usaha	Persentase UKM yang memiliki kemampuan manajemen pengelolaan usaha	Jumlah UKM yang memiliki kemampuan manajemen pengelolaan usaha dibagi jumlah seluruh UKM x 100%	Bidang UKM	Data Keragaan Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya UKM dalam mengakses permodalan	Persentase UKM yang mengakses permodalan	Jumlah UKM yang mengakses permodalan dibagi jumlah seluruh UKM x 100%	Bidang UKM Bidang Usaha dan Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Keragaan Koperasi</li> <li>- Data Statistik Bank Indonesia</li> </ul>

## 20. DINAS PASAR

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pelayanan dan pengelolaan Pasar yang Profesional</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan Pengelolaan Pasar dan penataan PKL yang lebih Profesional</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Terwujudnya Peningkatan pengelolaan Pasar dan Penataan PKL yang lebih profesional	a. Prosentase PKL yang ditata dan direlokasi sesuai komoditas	$\frac{\text{Jumlah PKL yang ditata dan direlokasi sesuai komoditas}}{\text{Jumlah keseluruhan PKL Kota Malang}} \times 100\%$	Bidang Pengendalian dan Penertiban PKL	Dinas pasar
	b. Presentase Revitalisasi Pasar	$\frac{\text{Jumlah pasar tradisiona yang memenuhi standart}}{\text{Jumlah keseluruhan paial}} \times 100\%$	Bidang Pemeliharaan	Dinas pasar
Meningkatnya pelayanan pasar tradisional	Survey Pedagang Tradisional Kepuasan Pasar	Nilai SKM	Sekretariat	Dinas pasar

## 21. DINAS PENDAPATAN DAERAH

<b>VISI</b>	<b>: Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Capaian Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Jumlah realisasi Pajak Daerah}}{\text{target Pajak Daerah}} \times 100 \%$	Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi	Data Realisasi Pajak Daerah
	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	$\frac{\text{Penerimaan pajak daerah tahun (x) - penerimaan pajak daerah tahun (x-1)}}{\text{penerimaan pajak daerah tahun (x-1)}} \times 100 \%$	Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi	Data Realisasi Pajak Daerah
	Persentase Penurunan tunggakan Pajak Daerah	$\frac{\text{Tunggakan pajak daerah tahun (x-1) - tunggakan pajak daerah tahun (x)}}{\text{tunggakan pajak daerah tahun (x-1)}} \times 100 \%$	Bidang Penagihan	Data Base Tunggakan Pajak Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat	Sekretariat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Efisiensi pengelolaan pendapatan Pajak Daerah	Rasio biaya terhadap pendapatan Pajak Daerah	Total jumlah belanja	Sekretariat	Data Laporan Keuangan
		$\frac{\text{Total jumlah belanja}}{\text{Jumlah penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$		

## 22. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Kota Malang yang Bersih, Hijau dan Nyaman</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan pengelolaan persampahan dari sumber sampah sampai pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Terwujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah	a. Persentase pengurangan sampah melalui 3R	Volume sampah yang berkurang (3R) dibagi Volume timbulan sampah se Kota Malang x 100%	UPT Pengelolaan Sampah dan Air Limbah	Laporan Kegiatan
	b. Persentase volume sampah yang terangkut ke TPA	Volume sampah yang terangkut ke TPA dibagi Volume timbulan sampah se Kota Malang x 100%	Bidang Kebersihan	Laporan Kegiatan
Meningkatnya kualitas sanitasi persampahan pemukiman perkotaan	a. Persentase penduduk yang dilayani pengangkutan sampah	Jumlah penduduk yang dilayani keg.pengangkutan sampah (jiwa) dibagi Total Jumlah penduduk perkotaan x 100%	Bidang Kebersihan	Laporan Kegiatan
	b. Persentase pengoperasian TPA	A +B + C  A = koefisien TPA x 40%  B = Koefisien kualitas pengolahan lindi x 40%  C = Koefisien Penanganan gas x 20%	UPT Tempat Pemrosesan Akhir	Laporan Kegiatan

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Terwujudnya kualitas sanitasi lingkungan pada kawasan permukiman	Persentase masyarakat yang memiliki sanitasi	Jumlah masyarakat yang memiliki sanitasi dibagi Jumlah penduduk se Kota Malang x 100%	UPT Pengelolaan Sampah dan Air Limbah	Laporan Kegiatan
Meningkatnya kualitas sanitasi air limbah pemukiman perkotaan	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Jumlah penduduk (jiwa) yang terlayani tangki septik/ MCK dibagi Total Jumlah penduduk kota (jiwa ) x 100%	UPT Pengelolaan Sampah dan Air Limbah	Laporan Kegiatan

**MISI 2 : Meningkatkan kualitas, kuantitas dan ketersediaan daya dukung RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kota dan pemakaman**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	Persentase luasan RTH Publik dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	Luas RTH publik (Ha) dibagi Total luas kota (Ha) x 100% Penjelasan : RTH publik minimal 20% dari seluruh luas wilayah Kota	Bidang Pertamanan	Data Luasan RTH

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya pelayanan pemakaman	a. Persentase masyarakat (ahli waris ) yang puas terhadap pelayanan pemakaman	Masyarakat yang puas pelayanan pemakaman di DKP dibagi Ahli waris yang mengajukan pemakaman di DKP x 100%	Bidang Pemakaman	Hasil Survey pada masyarakat (ahliwaris)
	b. Persentase peningkatan luasan lahan makam	Jumlah luasan lahan makam tahun n dikurangi jumlah luasan lahan makam tahun n-1 dibagi luasan lahan makam tahun n-1 x 100%	Bidang Pemakaman	Data lahan makam

**MISI 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan umum dan dekotrasi kota untuk mendukung penguatan karakter kawasan kota**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya ketersediaan Fasilitas PJU diperkotaan	Persentase Fasilitas Penerangan Jalan	Jumlah PJU terpasangJumlah PJU terpasang dibagi Total panjang jalan pada jalan kota/jarak antar tiang x 100%	Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota	Data Penerangan Jalan Umum
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kebersihan dan Pertamanan Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat



### 23. DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya tenaga kerja yang kompetitif, sukses transmigrasi, terjalinnya hubungan industrial yang harmonis, dan perlindungan tenaga kerja menuju pelayanan yang prima</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Membina dan mengembangkan keterampilan/kompetensi dan produktifitas tenaga kerja yang mempunyai daya saing dan memperluas kesempatan kerja</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja	a. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang di latih <b>dibagi</b> jumlah pendaftara pelatihan berbasis kompetensi <b>dikali</b> 100%	Bidang pelatihan dan penempatan	Laporan kegiatan pelatihan kompetensi yang dilaksanakan Disnakertrans
	b. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah tenaga kerja yang telah <b>di bagi</b> jumlah pendaftar pelatihan berbasis kewirausahaan <b>dikali</b> 100%	Bidang pelatihan dan penempatan	Laporan kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan Disnakertans
	c. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang di tempatkan <b>dibagi</b> jumlah pencari kerja yang terdaftar <b>dikali</b> 100%	Bidang pelatihan dan penempatan	a. Laporan indeks penempatan kerja (IPK) b. Laporan penempatan tenaga kerja dari kantor perwakilan penempatan

				tenaga kerja, perusahaan pemberi kerja yang mendaftarkan lowongan kerja, perusahaan pemberi kerja, perusahaan penyedia jasa pekerja dan bursa kerja khusus
	d. Rasio penduduk yang bekerja	Jumlah tenaga kerja yang bekerja <b>dibagi</b> jumlah angkatan kerja	Bidang pelatihan dan penempatan	a. Data dari BPS b. Laporan jumlah pengangguran dari Disnakertrans
	e. Rasio daya serap tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMDA/PMDN <b>dibagi</b> jumlah seluruh PMA dan PMDN	Bidang pengawasan	Laporan wajib lapor ketenagakerjaan dari perusahaan
	f. Angka partisipasi angkatan kerja	Angkatan kerja 15 tahun ke atas <b>dibagi</b> jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dikali 100%	Bidang pelatihan dan penempatan	a. Data dari BPS b. Laporan jumlah pengangguran dari Disnakertans
	g. Presentase tingkat pengangguran terbuka	Jumlah angkatan kerja yang menganggur (tidak bekerja) <b>dibagi</b> jumlah angkatan kerja 15 tahun keatas <b>dikali</b> 100%	Bidang pelatihan dan penempatan	a. Data dari BPS b. Laporan jumlah pengangguran dari Disnakertrans

**MISI 2 : Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan ketengangan dalam bekerja, serta meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan terciptanya iklim usaha yang kondusif dan harmonis	a. Persentase pemeriksaan perusahaan	Jumlah perusahaan yang di periksa <b>dibagi</b> jumlah perusahaan yang terdaftar <b>dikali</b> 100%	Bidang pengawasan	Laporan hasil pemeriksaan perusahaan
	b. Persentase pengujian peralatan di perusahaan	Jumlah persalatan yang di uji <b>dibagi</b> jumlah peralatan yang terdaftar <b>dikali</b> 100%	Bidang pengawasan	Laporan hasil pengujian peralatan K3
	c. Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan social ketenagakerjaan	Jumlah pekerja/buruh peserta program jaminan social ketenagakerjaan <b>dibagi</b> jumlah pekerja/buruh <b>dikali</b> 100%	Bidang pengawasan	Laporan kepesertaan jaminan social ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan
	d. Persentase kasus yang di selesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) <b>dibagi</b> jumlah kasus yang di daftarkan <b>dikali</b> 100%	Bidang hubungan industrial	Laporan pendaftaran dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial

## 24. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

<b>VISI</b>	: Terwujudnya Kota Malang Informatif
<b>MISI 1</b>	: Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan komunikasi

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya pelayanan komunikasi dan telekomunikasi	Persentase penyelesaian pengaduan materi SMS pengguna nomor telekomunikasi dalam rangka perlindungan masyarakat	Jumlah pengaduan yang terselesaikan di bagi jumlah pengaduan keseluruhan X 100%	Bidang Informasi Publik	Website Kota Malang
	Persentase peningkatan pengunjung website per tahun	Jumlah pengunjung website tahun n dikurangi pengunjung website tahun n-1 dibanding jumlah pengunjung website tahun n-1 x 100%	Bidang Informasi Publik	Website Kota Malang
	Persentase luas area blank spot	Luas area blank spot dibagi luas wilayah x 100%	Bidang Pos dan Telekomunikasi	Laporan hasil surve area blank spot
Meningkatnya pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Persentase informasi yang di sebarakan melalui KIM	Jumlah informasi yang di sebarakan melalui KIM di bandingkan jumlah seluruh informasi melalui (KIM, WEBSITE, Media Lainnya) x 100%	Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi	KIM (kelompok Informasi Masyarakat )

**MISI 2** : Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan Informatika

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan informatika	Persentase simda yang terintegrasi	Jumlah SIMDA yang telah diintegrasikan di bandingkan seluruh SIMDA x 100%	Bidang Aptel	Jumlah SIMDA
	Nilai Survei kepuasan Masyarakat	Survei kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretariat	Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

## 25. DINAS SOSIAL

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Sejahtera dan Bermartabat</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui peyelenggaraan kesejahteraan sosial</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS	1. Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang telah mendapat bantuan <b>dibagi</b> PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang seharusnya mendapat bantuan x 100%	Bidang Rehabilitasi Sosial	Laporan Hasil Kegiatan PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang telah mendapat bantuan
	2. Prosentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial <b>dibagi</b> Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial Yang seharusnya menerima jaminan Sosial x 100 %		Laporan Hasil Kegiatan Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	3. Prosentase masyarakat korban bencana alam tanggap darurat yang memperoleh bantuan sosial	masyarakat korban bencana alam tanggap darurat yang memperoleh bantuan sosial <b>dibagi</b> masyarakat korban bencana alam tanggap darurat yang seharusnya memperoleh bantuan sosial x 100%	Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial.	Laporan Hasil Kegiatan Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Meningkatnya kualitas dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase ( % ) PMKS yang mendapat bantuan dan Perlindungan sosial	PMKS yang mendapat bantuan dan Perlindungan sosial <b>dibagi</b> PMKS yang seharusnya mendapat bantuan dan Perlindungan sosial x 100%	Bidang Bantuan Dan Perlindungan Sosial	Laporan Hasil Kegiatan PMKS yang mendapat bantuan dan Perlindungan sosial

**MISI 2 : Mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya peranserta, pola kemitraan dan nilai – nilai kesetiakawanan lembaga dan/atau perorangan dalam penyelenggaraan sosial	Prosentase masyarakat yang memanfaatkan LBK Pandan wangi dari PMKS Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	masyarakat yang memanfaatkan LBK Pandan wangi dari PMKS Perempuan Rawan Sosial Ekonomi PMKS yg mendapat Pelatihan <b>dibagi</b> masyarakat yang memanfaatkan LBK Pandan wangi dari PMKS Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang seharusnya mendapat Pelatihan x 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial	Laporan Bulanan
	Prosentase masyarakat yang memanfaatkan Barak Sukun	masyarakat yang memanfaatkan Barak Sukun yang telah menempati TWK SUKUN <b>dibagi</b> masyarakat yang seharusnya memanfaatkan Barak Sukun x 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial	Laporan Bulanan



KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Prosentase Perawatan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Veteran dan Taman Makam Pahlawan TRIP	Lamanya Perawatan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Veteran dan Taman Makam Pahlawan TRIP Perawatan dan Pemeliharaan <b>dibagi</b> Lamanya Perawatan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Veteran dan Taman Makam Pahlawan TRIP Perawatan dan Pemeliharaan seharusnya di lakukan x 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial	Laporan Bulanan

**26. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

<b>VISI</b>	<b>: Mengembangkan dan Melestarikan Kebudayaan, nilai sejarah, tradisi, adat istiadat dan peninggalan purbakala sebagai media untuk mempererat persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah air</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Menjadikan nilai sejarah, tradisi, adat istiadat dan peninggalan purbakala sebagai aset guna kepentingan pembelajaran</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya nilai sejarah, tradisi, adat istiadat dan kepurbakalaan sebagai warisan luhur budaya	Persentase Objek cagar budaya yang terawat	Jumlah cagar budaya yang terawat dibagi jumlah seluruh cagar budaya x 100%	Bidang Sejarah dan Nilai Tradisi	Dokumen Inventarisasi Benda Cagar Budaya
	Persentase tradisi dan adat istiadat budaya yang terjaga	Jumlah tradisi dan adat istiadat budaya yang terjaga dibagi jumlah seluruh adat istiadat budaya x 100%	Bidang Kesenian	Hasil Monitoring Bidang Kesenian
Meningkatnya seni budaya dan tradisi Kota Malang yang dikenal masyarakat	Persentase kelompok kebudayaan yang masih aktif yang dibina	Jumlah Kelompok kebudayaan yang telah menerima pembinaan dibagi jumlah seluruh kelompok kebudayaan yang masih aktif x 100%	Bidang Kesenian	Hasil Monitoring Bidang Kesenian

**MISI 2 : Mengembangkan, mempromosikan dan menjadikan pariwisata Kota Malang menjadi destinasi pariwisata unggulan**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Terciptanya peluang usaha dan lapangan pekerjaan dari sektor pariwisata	Jumlah kunjungan Wisatawan Domestik dan Wisatawan Mancanegara ke Kota Malang	Jumlah kunjungan Wisatawan Domestik dan Wisatawan Mancanegara ke Kota Malang	Bidang Pengembangan Produk Promosi Wisata	Hasil Monitoring Bidang Pengembangan Produk Promosi Wisata

## 27. DINAS PERTANIAN

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pembangunan Pertanian Berwawasan Agribisnis</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan swasembada pangan yang berkelanjutan</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatkan ketersediaan pangan utama (food availability)	Ketersediaan pangan utama (food availability)	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama pertahun (kg) dibagi Jumlah penduduk x 100%	Bidang Tanaman	Database Dinas Pertanian
Peningkatan produktifitas lahan dengan penerapan GAP (Good Agricultural Practice)	Peningkatan produktifitas hasil pertanian	Peningkatan produktifitas sebesar 3,3% per tahun	Bidang Tanaman	Database Dinas Pertanian

<b>MISI 2</b>	<b>: Mengoptimalkan pengelolaan usaha pertanian</b>
---------------	---

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan manajemen lembaga tani dan usaha kemitraan	presentase pengusaha kecil bidang pertanian yang sudah terjalin kemitraan	jumlah pengusaha kecil bidang pertanian yang sudah terjalin kemitraan dibagi jumlah seluruh pengusaha kecil bidang pertanian x 100%	Bidang Binus	Database Dinas Pertanian
Meningkatnya kualitas pelayanan pertanian	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretariat	Hasil Survey Kepuasan masyarakat

## 28. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

<b>VISI</b>	<b>: Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berintegritas</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Terlaksananya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat	a. Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Jumlah Polisi Pamong Praja X 10.000 <b>dibagi</b> jumlah penduduk	Bidang Sumber Daya Aparatur	– Data Personil SatpolPP – Data Kependudukan
	b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah kelompok patroli dikalikan 3 patroli dalam sehari <b>dibagi</b> jumlah kecamatan	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	– Data regu patroli
	c. Prosentase pelanggaran Perda yang di tindak	Jumlah pelanggaran Perda yang ditindak <b>dibagi</b> jumlah pelanggaran perda <b>dikali</b> 100%	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	– Data pelanggaran perda
Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Sekretariat	– Hasil SKM

**MISI 2 : Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitas peran serta dan pemberdayaan masyarakat**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	1. Prosentase tindak kriminalitas yang tertangani	Jumlah tindak kriminal tertangani <b>dibagi</b> jumlah tindak kriminal <b>dikali</b> 100%	Bidang Perlindungan Masyarakat	– Data tindak kriminal
	2. Rasio Pos Kamling per 100 KK	Jumlah Pos Kamling x 100 <b>dibagi</b> jumlah keseluruhan Kepala Keluarga	Bidang Perlindungan Masyarakat	– Data Pos Kamling – Data Kependudukan – Monografi Kelurahan
	3. Rasio Petugas Linmas per RT	Jumlah satuan linmas <b>dibagi</b> jumlah Rukun Tetangga (RT)	Bidang Perlindungan Masyarakat	– Data Personil Satlinmas – Monografi Kelurahan

## 29. KANTOR KETAHANAN PANGAN

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pemantapan Ketahanan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan Produktivitas Pemantapan Ketahanan Pangan</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya ketersediaan pangan utama (food availability)	a. Ketersediaan energy dan protein per kapita	Ketersediaan pangan perkapita perhari dibagi 100 dikali kandungan kalori dikali Bahan Makanan Dapat Dimakan	Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	BPS, Bulog, Dinas Pertanian , Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pasar, BKBPM, Dinas Kesehatan
		Ketersediaan pangan perkapita perhari dibagi 100 dikali Kandungan Protein dikali Bahan Makanan Dapat Dimakan Penjelasan : 1. Ketersediaan energy per kapita adalah Sejumlah kalori hasil pembakaran karbohidrat yang berasal dari berbagai jenis bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk Kota Malang dalam satu Tahun 2. Ketersediaan protein per kapita adalah Sejumlah suatu persenyawaan yang mengandung unsur “N”, sangat dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan serta penggantian jaringan-jaringan yang rusak yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk Kota Malang dalam satu Tahun		

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	b. Penguatan cadangan pangan	<p>Jumlah Cadangan Pangan Kota Malang dibagi 100 Ton dikali 100 persen</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Penguatan Cadangan Pangan adalah Peningkatan Cadangan Pangan Kota</p>	Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	BPS, Bulog, Dinas Pertanian Kota Malang
	c. Skor pola pangan harapan (PPH)	<p>Nilai capaian peningkatan = % AKG x bobot masing-masing kelompok pangan</p> <hr/> <p>Energi masing-masing komoditas dibagi angka kecukupan gizi dikali 100 persen</p>	Kasi Keanekaragaman dan Keamanan Pangan	Neraca Bahan Makanan Kota Malang



### 30. KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH

<b>VISI</b>	<b>: Menjadikan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang terdepan dalam pembelajaran non formal serta menjadikan arsip sebagai keutuhan informasi</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan minat baca dan mengembangkan koleksi bahan pustaka</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya minat baca dan jumlah kunjungan pemustaka	Prosentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan tahun n dikurangi jumlah pengunjung perpustakaan tahun n-1 dibagi jumlah pengunjung perpustakaan tahun n-1 x 100%	Seksi layanan dan Informasi	Statistik Pengunjung
Meningkatkan sistem tertib administrasi dan pengembangan SDM Kearsipan	Prosentase peningkatan dokumen arsip yang terolah	Jumlah dokumen arsip yang terolah tahun n dikurangi jumlah dokumen arsip yang terolah tahun n-1 dibagi jumlah dokumen arsip yang terolah tahun n-1 x 100%	Seksi Akuisisi, Deposit dan Pengolahan	Data Arsip
Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan umum dan arsip daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Pengukuran SKM	Sub Bagian Tata Usaha	Hasil Survey Kepuasan Pelanggan

**31. SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI**

<b>VISI</b>	<b>: Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan KORPRI yang Berkualitas</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan kinerja Dewan Pengurus KORPRI Kota Malang</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan KORPRI	Kualitas nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyarakat	Kepala Subbag Umum	Laporan hasil survey kepuasan masyarakat

**32. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermartabat</b>
<b>MISI</b>	<b>: Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Cepat, Tepat dan Terjangkau</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka mencapai standard rumah sakit yang di terapkan oleh pemerintah	a. Bed Occupancy	$\text{BOR} = \frac{\sum \text{perawatan RS dalam waktu tertentu}}{\text{Satuan Waktu}}$	RSUD	
	b. Terakreditasinya rumah sakit oleh KARS	Sertifikat Akreditasi KARS	RSUD	

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit	a. Angka penggunaan tempat tidur	BOR $\frac{\Sigma \text{perawatan RS dalam waktu tertentu}}{\text{Jumlah tempat tidur X jumlah hari dalam satuan minggu}}$	RSUD	Rekam Medik RS
	b. Rata-rata lamanya pasien di rawat	ALOS $\frac{\text{Jumlah hari perawatan pasien keluar RS}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup+mati)}}$	RSUD	Rekam Medik RS
	c. Angka perputaran tempat tidur	BTO $\frac{\text{Jumlah pasien keluar RS (Hidup+Mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}$	RSUD	Rekam Medik RS
	d. Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak di tempati	TOI $\frac{(\text{Jumlah tempat tidur X Hari} - \text{hari perawatan RS})}{\text{Jumlah pasien keluar RS (Hidup+Mati)}}$	RSUD	Rekam Medik RS
	e. Angka kematian 48 jam untuk di rawat tiap-tiap 1000 penderita	NDR $\frac{\text{Jumlah pasien keluar mati} \geq 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (Hidup+Mati)}} \times 100\%$	RSUD	Rekam Medik RS
	f. Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar	GDR $\frac{\text{Jumlah pasien keluar mati} \geq 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (Hidup+Mati)}} \times 100\%$	RSUD	Rekam Medik RS

<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/</b>	<b>PENANGGUNG</b>	<b>SUMBER DATA</b>
----------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------	--------------------

<b>TUJUAN/SASARAN</b>	<b>UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b>	<b>JAWAB</b>	
	g. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM    Nilai IKM	RSUD	Rekam Medik RS

### 33. KECAMATAN KLOJEN

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Adil, Profesional dan Akuntabel</b>
<b>MISI</b>	<b>: Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas transparan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Wilayah Kecamatan	Prosentase kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai survei kepuasan masyarakat sekurang-kurangnya 75 dibagi jumlah kelurahan x 100%	Sekretaris Kecamatan dan Kasi Pemerintahan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 12 Kelurahan
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kasi Pelayanan Umum	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya kualitas musrenbang Wiliayah di Kecamatan	Prosentase kelurahan yang melaksanakan MUSRENBANGKEL sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Malang	Jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang sesuai dengan ketentuan dibagi jumlah seluruh kelurahan x 100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Hasil Musrenbang

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase pos kamling di wilayah kecamatan yang aktif melaksanakan fungsinya	<p>Jumlah pos kamling aktif dibagi jumlah seluruh pos kamling x 100 %</p> <p>Penjelasan : Yang dimaksud Pos Kamling Aktif adalah Pos Kamling yang melaksanakan ronda/piket minimal 1 kali seminggu.</p>	Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Monitoring Trantib
Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan	Prosentase organisasi sosial tingkat kecamatan yang aktif	Jumlah organisasi sosial tingkat kecamatan yang aktif dibagi jumlah seluruh organisasi sosial tingkat kecamatan x 100%	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Laporan Kegiatan Tahunan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

### 34. KECAMATAN LOWOKWARU

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya pelayanan prima yang akuntabel dan bermartabat</b>
<b>MISI</b>	<b>: Mewujudkan pelayanan publik yang Berkualitas, Akuntabel dan Bermartabat</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Wilayah Kecamatan	Prosentase kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai survei kepuasan masyarakat sekurang-kurangnya 75 dibagi jumlah kelurahan x 100%	Sekretaris Kecamatan dan Kasi Pemerintahan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 12 Kelurahan
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kasi Pelayanan Umum	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya kualitas musrenbang Wiliayah di Kecamatan	Prosentase kelurahan yang melaksanakan MUSRENBANGKEL sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Malang	Jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang sesuai dengan ketentuan dibagi jumlah seluruh kelurahan x 100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Hasil Musrenbang



<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase pos kamling di wilayah kecamatan yang aktif melaksanakan fungsinya	<p>Jumlah pos kamling aktif dibagi jumlah seluruh pos kamling x 100 %</p> <p>Penjelasan : Yang dimaksud Pos Kamling Aktif adalah Pos Kamling yang melaksanakan ronda/piket minimal 1 kali seminggu.</p>	Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Monitoring Trantib
Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan	Prosentase organisasi sosial tingkat kecamatan yang aktif	Jumlah organisasi sosial tingkat kecamatan yang aktif dibagi jumlah seluruh organisasi sosial tingkat kecamatan x 100%	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Laporan Kegiatan Tahunan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

### 35. KECAMATAN BLIMBING

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Profesional dan Akuntabel Menuju Kecamatan Blimbing Yang Bermartabat</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik secara Profesional dan Akuntabel</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Wilayah Kecamatan	Prosentase kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai survei kepuasan masyarakat sekurang-kurangnya 75 dibagi jumlah kelurahan x 100%	Sekretaris Kecamatan dan Kasi Pemerintahan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 12 Kelurahan
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kasi Pelayanan Umum	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya kualitas musrenbang Wiliayah di Kecamatan	Prosentase kelurahan yang melaksanakan MUSRENBANGKEL sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Malang	Jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang sesuai dengan ketentuan dibagi jumlah seluruh kelurahan x 100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Hasil Musrenbang

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase pos kamling di wilayah kecamatan yang aktif melaksanakan fungsinya	<p>Jumlah pos kamling aktif dibagi jumlah seluruh pos kamling x 100 %</p> <p>Penjelasan : Yang dimaksud Pos Kamling Aktif adalah Pos Kamling yang melaksanakan ronda/piket minimal 1 kali seminggu.</p>	Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Monitoring Trantib
Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan	Prosentase organisasi sosial tingkat kecamatan yang aktif	Jumlah organisasi sosial tingkat kecamatan yang aktif dibagi jumlah seluruh organisasi sosial tingkat kecamatan x 100%	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Laporan Kegiatan Tahunan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

**36. KECAMATAN KEDUNGKANDANG**

<b>VISI</b>	<b>: TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA .</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Wilayah Kecamatan	Prosentase kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai survei kepuasan masyarakat sekurang-kurangnya 75 dibagi jumlah kelurahan x 100%	Sekretaris Kecamatan dan Kasi Pemerintahan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 12 Kelurahan
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kasi Pelayanan Umum	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya kualitas musrenbang Wiliayah di Kecamatan	Prosentase kelurahan yang melaksanakan MUSRENBANGKEL sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Malang	Jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang sesuai dengan ketentuan dibagi jumlah seluruh kelurahan x 100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Hasil Musrenbang

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase pos kamling di wilayah kecamatan yang aktif melaksanakan fungsinya	<p>Jumlah pos kamling aktif dibagi jumlah seluruh pos kamling x 100 %</p> <p>Penjelasan : Yang dimaksud Pos Kamling Aktif adalah Pos Kamling yang melaksanakan ronda/piket minimal 1 kali seminggu.</p>	Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Monitoring Trantib
Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan	Prosentase organisasi sosial tingkat kecamatan yang aktif	Jumlah organisasi sosial tingkat kecamatan yang aktif dibagi jumlah seluruh organisasi sosial tingkat kecamatan x 100%	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Laporan Kegiatan Tahunan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

### 37. KECAMATAN SUKUN

<b>VISI</b>	<b>: TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA YANG AKUNTABEL</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntabel</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Wilayah Kecamatan	Prosentase kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai survei kepuasan masyarakat sekurang-kurangnya 75 dibagi jumlah kelurahan x 100%	Sekretaris Kecamatan dan Kasi Pemerintahan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 12 Kelurahan
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kasi Pelayanan Umum	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya kualitas musrenbang Wiliayah di Kecamatan	Prosentase kelurahan yang melaksanakan MUSRENBANGKEL sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Malang	Jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang sesuai dengan ketentuan dibagi jumlah seluruh kelurahan x 100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Hasil Musrenbang

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase pos kamling di wilayah kecamatan yang aktif melaksanakan fungsinya	Jumlah pos kamling aktif dibagi jumlah seluruh pos kamling x 100 %  Penjelasan : Yang dimaksud Pos Kamling Aktif adalah Pos Kamling yang melaksanakan ronda/piket minimal 1 kali seminggu.	Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Monitoring Trantib
Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan	Prosentase organisasi sosial tingkat kecamatan yang aktif	Jumlah organisasi sosial tingkat kecamatan yang aktif dibagi jumlah seluruh organisasi sosial tingkat kecamatan x 100%	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Laporan Kegiatan Tahunan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

**WALIKOTA MALANG,**

**H. MOCH. ANTON**